

Evaluasi Terhadap Kawasan Perbatasan Darat Indonesia Melalui Lima Dimensi Indeks Pembangunan

Evaluation of Indonesia's Land Border Areas through the Five Dimensions of Development Index

Dian Anggraeny Rahim¹, D.S. Priyarsono², Ernan Rustiadi³, Yusman Syaukat⁴

Diterima: 22 Agustus 2021

Disetujui: 23 Oktober 2023

Abstrak: Pembangunan kawasan perbatasan adalah suatu amanat Nawacita yaitu membangun dari pinggiran. Berbagai program telah dilaksanakan di kawasan perbatasan yang memiliki tujuan untuk keberhasilan perbatasan, namun pembangunan di kawasan perbatasan belum menunjukkan hasil maksimal, bahkan jika dibandingkan dengan kawasan non perbatasan pada propinsi yang sama. Penelitian ini dilakukan pada rentang tahun 2015 - 2020 di lima propinsi yang memiliki kawasan perbatasan darat yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah melalui lima dimensi pada indeks pembangunan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi teknologi informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan dan menggunakan dua puluh enam variabel. Metode penghitungan yang dilakukan menggunakan metode Model Linier Agregation oleh OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan selama rentang waktu 2015 - 2020, indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi di kawasan perbatasan memiliki klasifikasi rendah, dimensi sosial memiliki klasifikasi tinggi, dimensi infrastruktur memiliki klasifikasi rendah kecuali Kalimantan Barat pada tahun 2015 -2018 memiliki klasifikasi sedang, dimensi teknologi informasi dan komunikasi memiliki klasifikasi rendah, dimensi lingkungan memiliki klasifikasi rendah.

Kata kunci: Pembangunan Perbatasan, Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dimensi Lingkungan

Abstract: The development of the border area is a mandate of Nawacita that build from the periphery. Various programs have been implemented in border areas that have a goal for border success, but it has not shown maximum results, even when compared to non-border areas in the same province. This study was conducted in the span of 2015-2020 in five provinces that have land border areas, namely West Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, East Nusa Tenggara, and Papua. The purpose of this research is to evaluate the development that has been done by the government through five dimensions of development, namely the economic dimension, social dimension, infrastructure dimension, information technology and communication dimension, environmental dimension, and twenty-six variables The calculation method is carried out using the method Linier Agregation Model by the OECD. The results of this study showed that during the period 2015 - 2020, the development index based on economic dimensions in the border region had a low classification, the social dimension had a high

¹Universitas Darma Persada

²Departemen Ilmu Ekonomi, FEM, Institut Pertanian Bogor

³Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta, Institut Pertanian Bogor

⁴Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM, Institut Pertanian Bogor

Korespondensi: dian_rahim@apps.ipb.ac.id

classification, the infrastructure dimension had a low classification except West Kalimantan in 2015-2018 had moderate classification, the dimensions of information technology and communication had low classification, environmental dimensions had low classifications.

Keywords: Border Development, Economic Dimension, Social Dimension, Infrastructure Dimension, Information and Communication Technology Dimension, Environmental Dimension

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan di Indonesia meliputi perbatasan darat dan laut merupakan kawasan strategis baik dari sudut sosial, ekonomi, politik, budaya bahkan pertahanan keamanan negara. Pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis menjadi suatu keharusan agar kebijakan terhadap kawasan ini menjadi efektif (Newman, 2003). Pembangunan perbatasan ini pada dasarnya tidak semata-mata karena amanat Nawacita tetapi dilakukan karena wilayah perbatasan juga memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya (Cassidy, 2017). Salah satu visi pemerintah dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah menjadikan kawasan perbatasan antarnegara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin negara kesatuan Republik Indonesia (Nugroho, 2012). Visi tersebut adalah dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bertujuan agar kawasan perbatasan mampu meningkatkan ekonomi di daerah, mampu menurunkan ketimpangan dengan kawasan sekitarnya serta melakukan sinergi dengan perkembangan kawasan di negara tetangga.

Agenda perbaikan kawasan perbatasan ini pada dasarnya terefleksi dalam urutan prioritas agenda pemerintah yang tertuang dalam Nawacita pada tahun 2014, RPJMN tahun 2010-2014 dan RPJPN tahun 2005-2025. Agenda untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menempati posisi ketiga dari sembilan agenda prioritas pemerintahan (Hadi, 2018). Secara nyata, atas amanat Nawacita, pemerintah juga telah menyalurkan dana yang substansial untuk mengembangkan daerah perbatasan. Dimulai dari pembangunan infrastruktur yang massif berupa jalan, jembatan, pembangunan pasar, pusat perdagangan serta terminal. Kemudian dilakukan peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang difungsikan sebagai titik pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya menjadi tempat pengurusan administrasi di berbagai wilayah perbatasan namun juga sebagai zona pendukung yang mencerminkan dukungan pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Pada saat yang sama, pemerintah juga membangun kawasan khusus di beberapa kawasan perbatasan yaitu Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) sebagai suatu upaya menjadikan kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah (Kennedy, 2019).

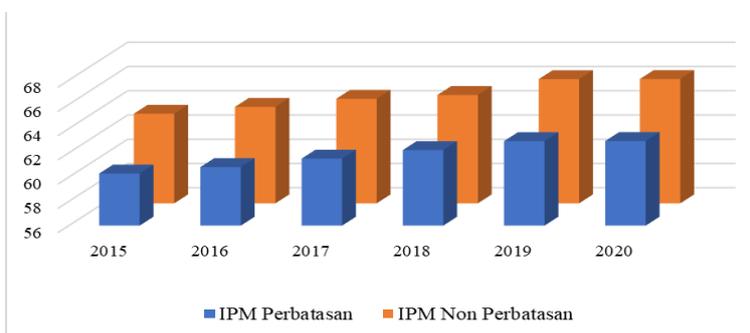
Selain sebagai pintu gerbang negara, kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Izzudin, et.al. 2022). Sejalan dengan itu, Grant (2018) menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan bernilai ekonomis yang sangat besar, terutama potensi SDA (hutan, tambang dan mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan di sekitar perbatasan. Sebagian besar dari potensi SDA tersebut belum dikelola dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai "paru-paru dunia" (*world heritage*) yang perlu dijaga dan dilindungi. Potensi wilayah yang besar tersebut berbanding terbalik dengan kemajuan pembangunan wilayah. Hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di

kawasan perbatasan tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah yang bukan perbatasan di propinsi yang sama. Gambar 1 menunjukkan sebagian ketertinggalan kawasan perbatasan darat dibandingkan dengan kawasan non perbatasan.



Gambar 1. Perbandingan PDRB Perbatasan dan Non Perbatasan

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB di kawasan perbatasan jauh lebih rendah dibanding kawasan non perbatasan. Sepanjang tahun 2015 -2020, PDRB di kawasan perbatasan hanya mengalami kenaikan sebesar 0.06 %, sementara kawasan non perbatasan mengalami kenaikan sebesar 1.48 %. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan kenaikan PDRB di kawasan non perbatasan lebih cepat dibandingkan kawasan perbatasan darat (Gambar 1). Sementara jika diperhatikan lebih jauh, IPM di kawasan perbatasan juga menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan non perbatasan, walaupun kedua kawasan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0.8% sepanjang tahun 2015 – 2020. Namun kawasan perbatasan tetap memiliki nilai IPM yang lebih rendah (Gambar 2). Pada dasarnya, IPM yang lebih rendah ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia kawasan perbatasan lebih rendah dibanding kawasan non perbatasan.



Gambar 2. Perbandingan IPM Perbatasan dan Non Perbatasan

Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan perbatasan tersebut menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan SDA, rendahnya

penciptaan lapangan kerja, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi dari negara tetangga, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas SDM (Priyarsono, 2017). Untuk itu, penelitian ini ditujukan pada evaluasi pembangunan di perbatasan darat sebagai bagian dari amanat Nawacita melalui pembentukan indeks pembangunan yang didasarkan atas lima dimensi pembentuknya yaitu ekonomi, sosial, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi serta lingkungan. Tujuan penelitian ini juga nantinya sebagai dasar dalam mengembangkan skema kebijakan yang tepat untuk pengembangan kawasan perbatasan darat Indonesia.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Indonesia memiliki lima propinsi yang memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga. Kelima propinsi tersebut adalah propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia. Propinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste dan Papua berbatasan dengan Papua New Guinea. Penelitian ini meliputi kelima propinsi di kawasan perbatasan darat tersebut. Untuk mengevaluasi pembangunan di kawasan perbatasan darat pasca Nawacita digulirkan pemerintah pada tahun 2014, maka data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2015 – 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Metode Analisis

Untuk mengevaluasi pembangunan di kawasan perbatasan darat, maka disusun indeks pembangunan berdasarkan lima dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi teknologi informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan penghitungan *Model Linier Agregation* (OECD-JRC European Comission., 2008) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seleksi Data
2. Mengimputasi *missing data*
3. Normalisasi data indikator dengan beberapa pilihan metode *Z-Score*.

$$z_s = \frac{x - u}{\bar{\sigma}} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Z_s = nilai *Z Score*

X_{qc}^t = angka dasar variabel pada tahun t untuk kabupaten c

u = *mean*

$\bar{\sigma}$ = standard deviasi

4. Menghitung bobot setiap indikator melalui Analisis Faktor

$$\hat{L} = \sqrt{\hat{\lambda}_1 \hat{e}_1} \sqrt{\hat{\lambda}_2 \hat{e}_2} \dots \sqrt{\hat{\lambda}_p \hat{e}_m} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- \hat{L} = loading factor
- $\hat{\lambda}$ = akar ciri variabel
- \hat{e} = vektor ciri variabel

5. Menghitung indeks masing-masing kelompok dimensi melalui 2 cara:

A. Additive Aggregation Methode

$$IA = \sum_{q=1}^Q Rank_{qc} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- IA = index Additive
- q = variabel yang telah terstandarisasi

B. Geometric Aggregation Methode

$$G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n Xi} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

- GI = geometrik Index
- n = banyaknya variabel amatan
- Xi = data wilayah i

6. Klasterisasi hasil indeks melalui metode scoring dan dibagi atas 3 kelas, dengan rumus interval

$$Interval = \frac{x_{max} - x_{min}}{3} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- X_{max} = angka indeks tertinggi
- X_{min} = angka indeks terendah

Pembagian klasifikasi:

- Rendah : 0 – 0.89
- Sedang : 0.90 – 1.78
- Tinggi : 1.79 – 2.68

Variabel yang digunakan untuk mengukur dimensi pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Dimensi – Sub Dimensi dan Variabel

| Dimensi | Sub Dimensi | Variabel | Satuan | Sumber | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|------|
| Ekonomi | Pendapatan dan Urbanisasi | Pengeluaran perkapita | Rupiah | BPS | |
| | | PDRB per kapita | Rupiah | | |
| | Ketenagakerjaan | Pekerja di Sektor non pertanian | Pekerja <i>fulltime</i> | % | BPS |
| | | | Angkatan kerja | % | |
| | | | Tingkat Pengangguran terbuka | % | |
| | | | | % | |
| | Kemampuan Keuangan daerah | Rasio PAD | Kontribusi PMTB terhadap PDRB | % | BPS |
| | | | Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB | % | |
| | | | | % | |
| Sosial | Pendidikan | Rata-rata lama sekolah | % | BPS | |
| | | Harapan lama Sekolah | % | | |
| | | Angka partisipasi murni murid | % | | |
| | Kesehatan | Angka harapan hidup | Penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan | % | BPS |
| | | | | % | |
| | Kependudukan | Laju pertumbuhan penduduk | Jumlah penduduk tidak miskin | % | BPS |
| | | | | % | |
| | Sosial Lainnya | Rasio kriminalistas/penduduk | % | BPS | |
| | Infrastruktur | Pendidikan | Rasio murid dan jumlah sekolah | % | BPS |
| | | | Kesehatan | Jumlah puskesmas | Unit |
| | | | Jumlah tenaga Kesehatan | Orang | |
| | | Pelayanan publik | Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik | Luas Panen padi sawah | Ha |
| Panjang jalan diaspal | | | | Kilometer | |
| Rasio Koperasi/kecamatan | % | | | | |
| Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | Komunikasi | Jumlah kantor pos. | Unit | BPS | |
| Lingkungan | | Luas hutan lindung | Ha | BPS | |

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Sub dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi di kawasan perbatasan adalah pendapatan dan urbanisasi, ketenagakerjaan dan kemampuan keuangan daerah. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran perkapita, PDRB per kapita, pekerja di sektor non pertanian, pekerja *fulltime*, angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, rasio PAD, kontribusi PMTB terhadap PDRB serta kontribusi sektor tersier terhadap PDRB. Sepanjang tahun 2015 – 2020, masing-masing provinsi cukup dinamis.

Kalimantan Barat memiliki empat PKS (Pusat Kawasan Strategis Nasional) yaitu Paloh-Aruk, Jagoibabang, Entikong, dan Nanga Badau. PKS dibangun pada dasarnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bagi kawasan perbatasan darat dan sekitarnya. Indeks dimensi ekonomi kawasan perbatasan darat di Kalimantan Barat cukup

dinamis dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti setiap tahun terdapat peningkatan pada ekonomi wilayah di kawasan perbatasan darat.

Kalimantan Timur juga merupakan propinsi yang memiliki perbatasan darat yaitu kabupaten Kutai Barat dan Malinau, tetapi tidak memiliki PKSNI. Hal ini berarti di Kalimantan Timur belum memiliki kawasan strategis nasional, namun Kalimantan Timur dikenal sebagai propinsi yang memiliki PDRB yang tinggi dari sektor perkebunan sehingga ini berimbang pada kawasan perbatasan darat. Jika diperhatikan, indeks dimensi ekonomi kawasan perbatasan cukup fluktuatif, berkisar antara 0.39 – 0.51 selama tahun 2015 – 2020.

Kalimantan Utara adalah propinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur. Nunukan merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kalimantan Utara, walaupun propinsi baru, namun memiliki tiga PKSNI yaitu Nunukan, Simanggaris, dan Long Midang. Indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi kawasan ini masih terbelakang dibanding Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, yaitu berkisar antara 0.32 – 0.43 sepanjang tahun 2015 -2020.

Nusa Tenggara Timur memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yaitu Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao. Namun Nusa Tenggara Timur hanya memiliki dua PKSNI yaitu Kafemenanu di Timor Tengah Utara dan Atambua di Belu. Sepanjang tahun 2015 -2016 indeks dimensi ekonomi di Nusa Tenggara Timur termasuk stabil di angka 0.3, tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0.4 dan pada tahun berikutnya turun kembali di angka 0.3.

Papua memiliki enam kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yaitu Keerom, Merauke, Boven Digul, Pegunungan Bintang, Kota Jayapura dan Supiori. Namun dari ke enam kabupaten itu PKSNI hanya ada tiga yaitu PKSNI Merauke di Merauke, PKSNI Tanah Merah di Boven Digul dan PKSNI Jayapura di Kota Jayapura. Sepanjang tahun 2015 – 2020, nilai indeks dimensi ekonomi di Papua stabil berkisar di angka 0.3. Hal ini menunjukkan belum terlihat peningkatan yang signifikan dari kegiatan ekonomi di Papua. Tabel 2 menjelaskan indeks dimensi ekonomi di kawasan perbatasan.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Ekonomi Perbatasan Darat

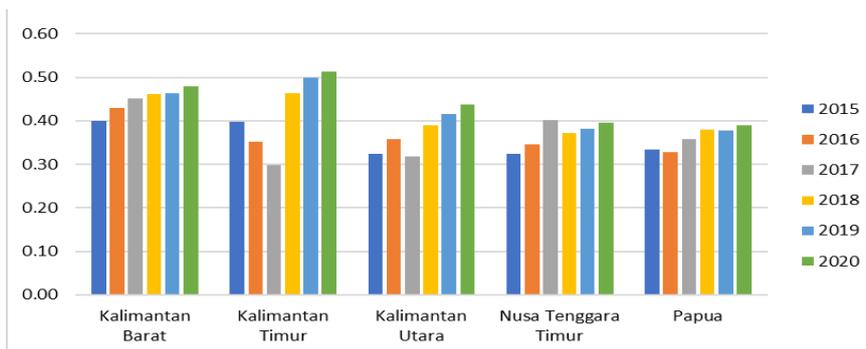
| Perbatasan Darat | Indeks Dimensi Ekonomi | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 0.40* | 0.43* | 0.45* | 0.46* | 0.46* | 0.48* |
| Kalimantan Timur | 0.40* | 0.35* | 0.30* | 0.46* | 0.49* | 0.51* |
| Kalimantan Utara | 0.32* | 0.36* | 0.32* | 0.39* | 0.41* | 0.44* |
| Nusa Tenggara Timur | 0.32* | 0.35* | 0.40* | 0.37* | 0.37* | 0.39* |
| Papua | 0.33* | 0.33* | 0.36* | 0.38* | 0.38* | 0.39* |

* = rendah

** = sedang

*** = tinggi

Gambar 3 menjelaskan dinamika tiap tahun dari indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi. Terlihat bahwa Kalimantan Barat setiap tahun mengalami kenaikan, sementara Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua mengalami kenaikan dan penurunan. Walaupun begitu, indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi di semua kawasan perbatasan darat Indonesia memiliki nilai dengan kategori rendah.



Gambar 3. Indeks Pembangunan Dimensi Ekonomi

2. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Sosial

Dimensi sosial memiliki sub dimensi pendidikan, kesehatan, kependudukan dan masalah sosial lainnya. Variabel yang digunakan dalam menghitung dimensi ini adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi murid, angka harapan hidup, penduduk yang tidak mengalami keluhan kesehatan, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk tidak miskin dan rasio tingkat kriminalitas penduduk.

Kalimantan Barat memiliki indeks pembangunan berdasarkan dimensi sosial yang lebih baik dibanding dimensi ekonomi pada rentang tahun yang sama, yaitu berkisar antara 2.1 – 2.2. Hasil ini didapat karena pemerintah daerah Kalimantan Barat secara berkala bersama pemerintah pusat memiliki program peningkatan kapasitas masyarakat terkait pendidikan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pelayanan Kesehatan (Mulyana, 2013).

Kalimantan Timur, salah satu provinsi yang merespon isu MDG's dengan cepat, memiliki program utama pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM, sehingga program ini berimbas ke kawasan perbatasan daratnya. Angka indeks di perbatasan darat Kalimantan Timur berkisar antara 2.6 – 2.7 sepanjang tahun 2015 -2020.

Sejalan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara adalah provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur. Nunukan adalah kawasan perbatasan darat yang cukup maju di Kalimantan Utara. Sebagai PKSN, Nunukan juga mampu menarik wisatawan dan menjadi pintu masuk bagi ekonomi lokal. Indeks dimensi sosial Kalimantan Utara berkisar antara 2.4 – 2.5 setiap tahunnya.

Nusa Tenggara Timur memiliki indeks pembangunan berdasarkan dimensi sosial yang fluktuatif yaitu berkisar antara 1.8 – 2.0 sepanjang tahun. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki program pengentasan kemiskinan sampai ke desa yang di gulirkan oleh beberapa kementerian. Program ini memiliki strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat, pengembangan organisasi dan kelembagaan, pengembangan kawasan pinggiran dan perbatasan darat, serta menerapkan teknologi tepat guna. Sebagai catatan kekerabatan di masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste cukup erat dan Belu sebagai PKSN merupakan pintu masuk bagi sosialisasi masyarakat dari kedua.

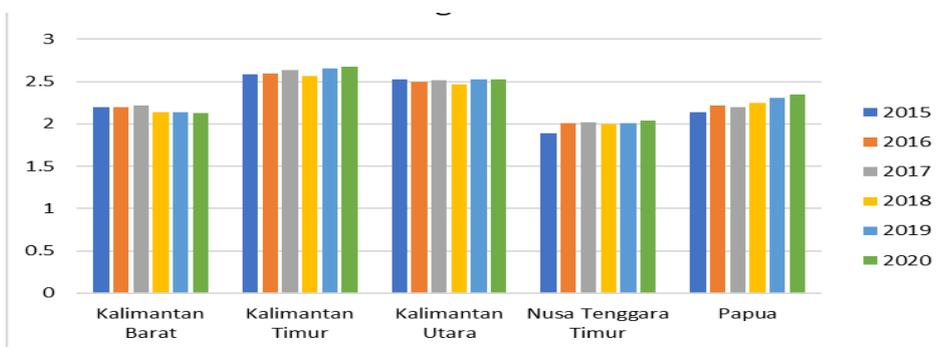
Sebagaimana Nusa Tenggara Timur, Papua juga memiliki kekerabatan yang erat dengan masyarakat di Papua Nugini, sehingga masyarakat di kedua negara bebas berinteraksi. Indeks sosial Papua berkisar antara 2.1 – 2.3 sepanjang tahun 2015 -2020. Papua juga memiliki program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang bersumber dari lintas kementerian. Permasalahan utama di perbatasan darat Papua adalah keamanan.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Sosial Perbatasan Darat

| Perbatasan Darat | Indeks Dimensi Sosial | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 2.20*** | 2.20*** | 2.22*** | 2.13*** | 2.14*** | 2.13*** |
| Kalimantan Timur | 2.59*** | 2.60*** | 2.63*** | 2.57*** | 2.66*** | 2.68*** |
| Kalimantan Utara | 2.52*** | 2.49*** | 2.51*** | 2.47*** | 2.53*** | 2.53*** |
| Nusa Tenggara Timur | 1.89*** | 2.00*** | 2.01*** | 1.99*** | 2.01*** | 2.03*** |
| Papua | 2.14*** | 2.22*** | 2.20*** | 2.24*** | 2.31*** | 2.35*** |

* = rendah
 ** = sedang
 *** = tinggi

Jika dilihat selama rentang tahun 2015-2020, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua berada pada klasifikasi tinggi. Angka ini memberikan respon positif bagi pengembangan di kawasan perbatasan darat Indonesia. Gambar diatas menjelaskan perubahan tiap tahunnya.



Gambar 4. Indeks Pembangunan Dimensi Sosial

3. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Infrastruktur

Indeks pembangunan berdasarkan dimensi infrastruktur memiliki subdimensi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Variabel dari sub dimensi ini adalah rasio murid SD dan jumlah sekolah, rasio murid SMP dan jumlah sekolah, rasio murid SMA dan jumlah sekolah, jumlah puskesmas, jumlah tenaga kesehatan, rumah tangga dengan sumber penerangan listrik, luas panen, panjang jalan di aspal dan rasio koperasi di kecamatan. Kesemua variabel ini menjadi dasar dalam penghitungan indeks infrastruktur.

Kawasan perbatasan darat di Kalimantan merupakan salah satu sasaran pembangunan infrastruktur sebagaimana yang di amanatkan Nawacita ketiga yaitu pembangunan dari pinggiran. Kalimantan Barat adalah salah satu kawasan perbatasan yang mendapatkan pembangunan infrastruktur secara massive. Pembangunan infrastruktur dimulai dari tahun 2015 sejalan dengan dimulainya Nawacita. Indeks pembangunan berdasarkan dimensi infrastruktur di Kalimantan Barat juga cukup fluktuatif berkisar dari 0.9 pada tahun 2015 – 2018, tetapi pada tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan menjadi 0.8 dan 0.7. BPS menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur di Kalimantan Barat berupa peningkatan panjang jalan, pembangunan jembatan dan irigasi serta peningkatan rumah tangga pengguna listrik berkisar rata-rata 10%.

Sebagaimana Kalimantan Barat, Kalimantan Timur juga mengalami percepatan pembangunan infrastruktur terkait Nawacita yang di canangkan pemerintah. Namun indeks dimensi infrastruktur Kalimantan Timur lebih rendah dibanding Kalimantan Barat, yaitu 0.18 – 0.2 sepanjang tahun 2015 - 2020. Begitu juga Kalimantan Utara, sebagai

provinsi baru hasil pemekaran Kalimantan Timur, Kalimantan Utara memiliki indeks dimensi infastruktur berkisar antara 0-3 – 0.5.

Indeks dimensi infrastruktur Nusa Tenggara Timur cukup dinamis berkisar antara 0.3 – 0.5 sepanjang tahun. Bahkan mulai tahun 2021 pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.

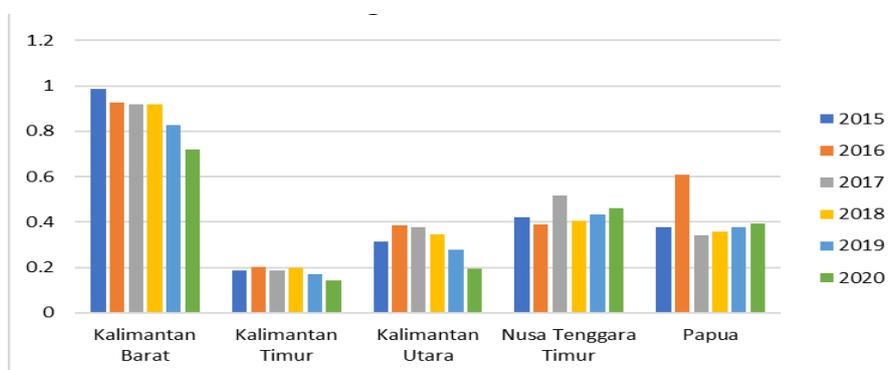
Indeks dimensi infrastruktur Papua berkisar antara 0.3 – 0.6 sepanjang tahun 2015 – 2020. Berdasarkan amanat Inpres No 9 tahun 2020, maka pembangunan infrastruktur di Papua semakin dipercepat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan wilayah. Program pembangunan terpadu tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah meliputi pembangunan jalan dan jembatan serta sarana prasarana sekolah.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Infrastruktur Perbatasan Darat

| Perbatasan Darat | Indeks Dimensi Infrastruktur | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 0.98** | 0.92** | 0.91** | 0.92** | 0.82* | 0.82* |
| Kalimantan Timur | 0.18* | 0.20** | 0.18* | 0.19** | 0.17* | 0.17* |
| Kalimantan Utara | 0.31* | 0.38** | 0.37* | 0.34* | 0.27* | 0.27* |
| Nusa Tenggara Timur | 0.42* | 0.38** | 0.51* | 0.40* | 0.43* | 0.45* |
| Papua | 0.37* | 0.60** | 0.34* | 0.35* | 0.37* | 0.37* |

* = rendah
 ** = sedang
 *** = tinggi

Indeks pembangunan berdasarkan dimensi infrastruktur di kawasan perbatasan cukup dinamis sepanjang tahunnya. Pada periode awal, sepanjang kawasan perbatasan darat Kalimantan memiliki nilai indeks sedang kemudian turun menjadi rendah. Penurunan ini terjadi karena pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan awalnya dilakukan secara massive pasca diberlakukannya Nawacita. Setelah pembangunan infrastruktur dilakukan, maka fase berikutnya adalah pemeliharaan dan pembangunan pada sektor lain yang dianggap lebih penting. Kemudian untuk Nusa Tenggara Timur dan Papua terjadi hal yang sama, yaitu mengalami kenaikan pada awalnya, walaupun cukup kecil kenaikannya, namun tahun-tahun berikutnya dimensi infrastruktur berada pada klasifikasi rendah. Gambar 5 menjelaskan indeks pembangunan dimensi infrastruktur.



Gambar 5. Indeks Pembangunan Dimensi Infrastruktur

4. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sub dimensi dari dimensi ini adalah komunikasi dan yang menjadi variabel adalah jumlah kantor pos. Kawasan perbatasan darat termasuk kawasan pinggiran sehingga beberapa sarana prasarana komunikasi seperti sinyal telepon dan internet acapkali mengalami kesulitan, namun kantor pos adalah variabel yang representatif untuk kebutuhan telekomunikasi.

Kalimantan Barat memiliki indeks dimensi teknologi informasi dan komunikasi berkisar di angka 0.4, Kalimantan Timur memiliki indeks 0.0001, Kalimantan Utara 0.25, Nusa Tenggara Timur 0.14 - 0.25 dan Papua berkisar antara 0.18 – 0.3.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

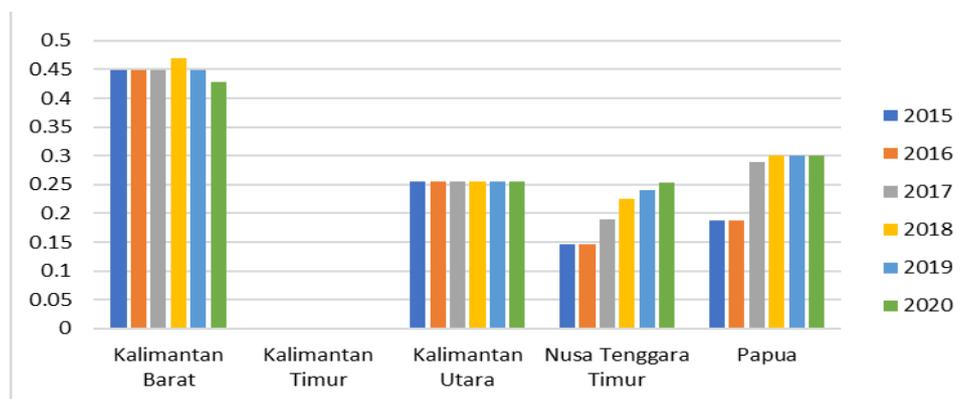
| Indeks Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Perbatasan Darat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 0.44* | 0.44* | 0.44* | 0.46* | 0.44* | 0.42* |
| Kalimantan Timur | 0.01* | 0.01* | 0.01* | 0.01* | 0.01* | 0.01* |
| Kalimantan Utara | 0.25* | 0.25* | 0.25* | 0.25* | 0.25* | 0.25* |
| Nusa Tenggara Timur | 0.14* | 0.14* | 0.18* | 0.22* | 0.24* | 0.25* |
| Papua | 0.18* | 0.18* | 0.28* | 0.30* | 0.33* | 0.33* |

* = rendah

** = sedang

*** = tinggi

Indeks pembangunan pada dimensi komunikasi di Kalimantan Barat cukup tinggi dibandingkan kawasan perbatasan lain, sedangkan Kalimantan Utara sepanjang tahun 2015 -2020 tetap diangka 0.25 tetapi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan sepanjang tahun dan Papua juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2016 ke tahun berikutnya. Tabel dibawah menjelaskan dinamika indeks pembangunan dimensi komunikasi di kawasan perbatasan.



Gambar 6. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Lingkungan

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas hutan lindung yang ada di provinsi di mana terdapat kawasan perbatasan darat. Kalimantan Barat memiliki indeks dimensi lingkungan yang berkisar antara 0.04 - 0.07. Seluruh pemerintah daerah di Kalimantan telah mengeluarkan Perda No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu usaha untuk menunjang keberhasilan program pembangunan lingkungan. Sementara indeks pembangunan berdasarkan dimensi

lingkungan di Kalimantan Timur berkisar antara 0.02 – 0.15, Kalimantan Utara 0.06 - 0.08, Nusa Tenggara Timur 0.04 -0.05 dan Papua 0.01 – 0.06.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Berdasarkan Dimensi Lingkungan

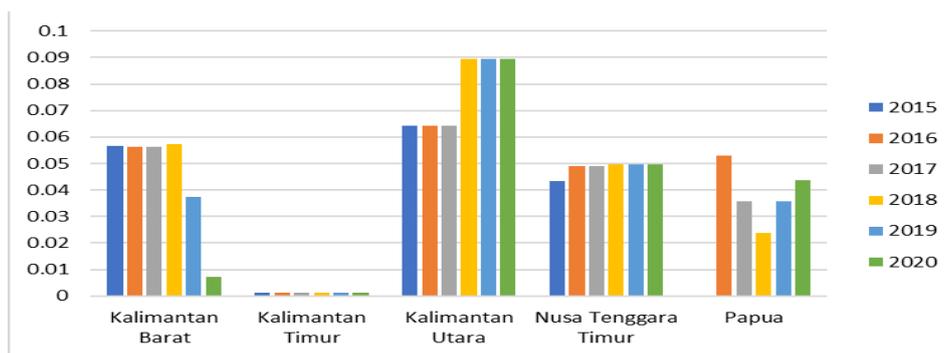
| Perbatasan Darat | Indeks Dimensi Lingkungan | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kalimantan Barat | 0.05* | 0.05* | 0.05* | 0.05* | 0.04* | 0.007* |
| Kalimantan Timur | 0.02* | 0.15* | 0.15* | 0.15* | 0.15* | 0.15* |
| Kalimantan Utara | 0.06* | 0.06* | 0.06* | 0.08* | 0.08* | 0.08* |
| Nusa Tenggara Timur | 0.04* | 0.04* | 0.04* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Papua | 0.01* | 0.05* | 0.03* | 0.03* | 0.05* | 0.06* |

* = rendah

** = sedang

*** = tinggi

Lingkungan memegang peranan penting bagi pembangunan suatu kawasan. Indeks pembangunan berdasarkan dimensi lingkungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang tahun cukup baik namun ada juga yang mengalami penurunan. Dinamika indeks pembangunan di kawasan perbatasan berdasarkan dimensi lingkungan tertera pada Gambar 7.



Gambar 7. Indeks Pembangunan Dimensi Lingkungan

Faktor Penting Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pada dasarnya pembangunan di kawasan perbatasan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, tidak hanya di bidang ekonomi namun juga sosial budaya. Pembangunan yang komprehensif adalah pembangunan yang berlandaskan pada lima dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi teknologi informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan (Nurzaman, 2012). Perencanaan dan program pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi meliputi kemampuan pengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Untuk kasus kawasan perbatasan, usaha pemerintah terkait peningkatan ekonomi masih membutuhkan usaha yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan pelaku usaha. Karena menilik hasil indeks pembangunan berdasarkan dimensi ekonomi, terlihat bahwa semua kawasan perbatasan darat berada pada klasifikasi rendah, terutama kawasan NTT dan Papua (Tabel 2). Beberapa sebabnya, ditengarai kedua kawasan ini memiliki permasalahan ekonomi yang cukup besar sementara ketersediaan sumberdaya masih terbatas.

Dimensi sosial mencakup pendidikan dan kesehatan masyarakat, sebagai catatan, pendidikan dan kesehatan adalah faktor utama dalam elemen indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan itu, *World Summit for Social Development* pada tahun 1995 di Copenhagen menegaskan bahwa pembangunan sosial bukan hanya memberi barang, pelayanan atau pemulihan bagi penyandang masalah sosial saja, tetapi ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan mempromosikan pentingnya kesejahteraan manusia. Perencanaan dan program pembangunan berdasarkan dimensi sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Perencanaan dan program pada dimensi infrastruktur mencakup pembangunan sarana dan prasarana pembangunan seperti jalan, jembatan dan irigasi, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan dalam konteks pengembangan wilayah strategis. Mengacu pada hasil penelitian ini, pada kenyataannya pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan, penyebaran pelayanan kesehatan, mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dilakukan terutama di daerah yang dikenal dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua dan NTT, sehingga berdampak pada signifikannya indeks pembangunan pada dimensi sosial (Tabel 3).

Dimensi teknologi informasi dan komunikasi mencakup kemudahan sarana prasarana komunikasi di daerah dan dirancang sebagai bagian dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang telah dirancang pemerintah sebagai program nasional. Pendekatan yang dilakukan melalui program menyediakan akses internet sampai ke desa dan menggalang kemitraan untuk kemudahan informasi. Terkait dimensi lingkungan, program diarahkan pada kegiatan pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Terdapat tiga faktor penting yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, yaitu perencanaan dengan mendahulukan infrastruktur (*infrastructure led*) sebagai investasi sebelum pengembangan ekonomi dimulai, investasi swasta (*investment led*), dan kebijakan pemerintah (*policy led*) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan (Wu, 2021). Ketiga point penting tersebut menjadi satu kesatuan penting bagi pembangunan di kawasan perbatasan dan tercermin pada keberhasilan lima dimensi pembangunan yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi teknologi informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan. Pembangunan harus diarahkan dengan mempertimbangkan klasifikasi dari indeks pembangunan dan skala prioritas bagi daerah tersebut (Jesuit & Sych, 2012). Pembangunan infrastruktur adalah hal yang pertama yang perlu dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan darat namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat (Bangun, 2014). Penelitian ini menunjukkan, kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan darat cukup beragam dan fluktuatif. Papua adalah daerah perbatasan dengan kondisi infrastruktur yang berada pada klasifikasi rendah selama rentang tahun 2015 -2020 (Tabel 4). Hal ini terjadi karena kondisi geografis kawasan perbatasan di Papua berada sangat jauh dari pusat pertumbuhan dan merupakan kawasan terpencil (*remote area*), sehingga pembangunan infrastruktur menjadi sangat sulit. Walaupun memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial maka sudah menjadi keniscayaan bahwa infastruktur sangat dibutuhkan sebagai penggerak untuk mengelola sumberdaya tersebut sehingga memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Muta'ali, 2014). Oleh karena itu, kehadiran pemerintah atau lembaga multilateral beserta seluruh program dan pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan khususnya pada tahap awal pembangunan (Capello & P., 2019). Pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang telah dipraktekkan negara-negara Eropa, merupakan investasi pembangunan secara fisik yang berguna untuk jangka panjang dan dapat dijadikan motor penggerak bagi pembangunan di kawasan perbatasan, mampu memberi kontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi backwash ekonomi di terhadap negara tetangga (Creamer et al., 2008). Infrastruktur tentunya juga dapat mendorong minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya bagi pembangunan di kawasan perbatasan. Dimensi infrastruktur dari suatu pembangunan di kawasan perbatasan akan terkait erat dengan dimensi ekonomi.

Faktor penting kedua adalah investasi yang terus menerus di kawasan perbatasan (Uttama, 2014). Investasi mengandung arti setiap kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi *output* dimasa yang akan datang, tidak hanya berupa penambahan persediaan fisik modal tetapi juga menyangkut investasi sumberdaya manusia (Luu & Nguyen, 2019). Investasi merupakan faktor yang esensial dalam proses pertumbuhan ekonomi, adanya investasi akan mendorong peningkatan modal perteneaga kerja (per kapita) (Kumari & Devadas, 2017). Adanya arus investasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transfer modal, teknologi, manajemen dan kewirausahaan. Faktor investasi juga akhirnya diharapkan mampu meningkatkan dimensi sosial dan ekonomi secara bersamaan. Agar dapat secara terus menarik minat investor berinvestasi, maka upaya-upaya perbaikan daya saing investasi harus ditingkatkan. Supartoyo (2013) mengelompokan investasi menjadi dua yaitu (1) investasi langsung (*direct investment*) dan (2) investasi tidak langsung (*indirect investment*). Investasi langsung pada dasarnya investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis), investasi jenis ini lebih terkenal sebagai investasi sektor riil, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap masyarakat luas. Investasi tidak langsung adalah investasi pada asset keuangan (*financial asset*) seperti deposito, surat berharga seperti pada saham dan obligasi, *commercial paper*, reksadana dan sebagainya.

Faktor ketiga adalah kebijakan pemerintah melalui koordinasi institusi pusat dan daerah (Rudolf, 2005). Kebijakan pemerintah merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu kawasan (Bellinger, 2007). Daerah perbatasan mempunyai potensi yang luar biasa, baik potensi alam, pariwisata, budaya, perkebunan, tambang dan banyak potensi lainnya, yang pada umumnya belum tergarap secara optimal. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah perbatasan sebagai kawasan beranda negara perlu dilakukan tidak hanya dengan pendekatan keamanan (*security approach*) yang diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), namun perlu dilengkapi dengan pendekatan ekonomi (*economy approach*) dengan mendorong investasi di daerah perbatasan sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya atau kearifan lokal (Rustiadi, 2015). Sebagai kawasan yang diharapkan kemajuannya, Kementerian PDTT (2017) mencatat ada 4 potensi investasi di kawasan perbatasan, dan mampu menjadi motor penggerak pengembangan kawasan perbatasan, yaitu (1) pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan, (2) pariwisata, (3) kelautan dan budidaya hasil laut, serta (4) pertambangan.

Skema Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Skema pengembangan kawasan perbatasan dibangun harus berdasarkan dua hal yaitu atas potensi dan masalah serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kedua hal tersebut kemudian diformulasikan dan ditransformasikan kedalam akselerasi pembangunan perbatasan negara (Migdal, 2004). Pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki peran besar. Williamson (2000) dalam tulisannya memaparkan model pembangunan kawasan yang berhasil itu merupakan hasil kolaboratif dari pembangunan geografis, budaya, ilmu politik, antropologis dan yang utama adalah sisi peningkatan ekonomi daerah tersebut dimana pemerintah sebagai *leader* dalam pembangunan di kawasan tersebut.

Hakikat pengembangan suatu kawasan perbatasan adalah kemampuan menjembatani antara potensi daerah dan masalah di daerah tersebut.

Sejalan dengan teori diatas, pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia memang masih mengalami beberapa kendala. Masalah utama yang sering terjadi di kawasan perbatasan adalah kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, keterisolasian dan keterbatasan usaha (Muta'ali, 2014). Kuncoro (2012) menjelaskan keberhasilan potensi ekonomi di wilayah perbatasan akan sangat tergantung pada bagaimana daerah tersebut menyusun dan mengelola wilayahnya, mengembangkan potensi daerah, termasuk meningkatkan investasi dan minat investor sesuai dengan kerangka desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi. Melalui kebijakan pemerintah seperti regulasi yang mendukung, organisasi yang kuat, perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, penganggaran untuk pembangunan serta adanya evaluasi, harapannya pembangunan kawasan perbatasan akan maksimal. Selanjutnya skema pembangunan kawasan perbatasan dirumuskan sebagaimana yang tertera pada Gambar 8.



Gambar 8. Skema Pembangunan Kawasan Perbatasan

Mengacu pada konsep strategi diatas, maka pembangunan kawasan perbatasan darat di Indonesia diarahkan pada 2 strategi utama, yaitu berdasarkan potensi ekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Berdasarkan pembentukan indeks pembangunan kawasan perbatasan diatas, terlihat bahwa dimensi ekonomi dari indeks pembangunan bernilai rendah, padahal memiliki potensi ekonomi yang baik namun belum maksimal dalam pengelolaan. Pada kondisi ini dibutuhkan peningkatan potensi daerah dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Dimensi sosial yang sudah masuk dalam klasifikasi tinggi menjadi keuntungan bagi kawasan perbatasan, sehingga memudahkan pencapaian masyarakat yang sejahtera. Dimensi infrastruktur, dimensi teknologi informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan, selain dibutuhkan kebijakan dan regulasi pemerintah, juga dibutuhkan peran serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan pembangunan kawasan perbatasan.

KESIMPULAN

Kawasan perbatasan pada dasarnya adalah kawasan yang unik. Selain berfungsi sebagai pintu gerbang suatu negara, kawasan perbatasan juga merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, memiliki potensi besar namun juga memiliki masalah yang tidak kecil. Perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan kebijakan

pemerintah meliputi regulasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta evaluasi. Sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan di kawasan perbatasan, kelima dimensi pembangunan yaitu dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi serta lingkungan dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan program pembangunan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat melalui program pembangunan sesuai skema yang telah ditetapkan. Program pembangunan yang dilakukan mengakomodir potensi dikawasan perbatasan mencakup pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, serta mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan disparitas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, B. H. (2014). Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Serawak (suatu studi perbandingan). *Jurnal MMH*, 43, 31–39.
- Bellinger, W. K. (2007). *The Economic Analysis of Public Policy*. Routledge Press.
- Capello, R., & P., N. (2019). *Handbook of Regional Growth and Development Theories*. Revised and Extended Edition. Edward Elgar Publishing.
- Cassidy K., Davis N.Y., W. G. (2017). Debordering and Everyday (re)Bordering in and of Dover: Postborderland Borderscapes. *Political Geography Journal*, 66, 171–179.
- Creamer, C., Blair, N., O’Keeffe, B., Egeerat, C. van, & Driscoll, J. (2008). *Fostering Mutual Benefit in Cross Border Areas; The Challenge An Opportunities in Connecting Irish Border Towns And villages*. Unknown Publisher.
- Grant, A. (2018). Crossing Khorgos: Soft Power, Security and Suspect Loyalties at the Sino Kazakh Boundary. *Political Geography Journal*, 76, 1–10.
- Hadi, S. (2018). Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Melalui Pengembangan Kawasan Perbatasan pada Daerah Hukum. Bappenas.
- Izzudin, M, Aris Marfai, Andri Kurniawan, Agung S. Nugroho, Isnaini Sadali (2022). Identifikasi Potensi Investasi Wilayah Perbatasan Indonesia. *MKG Vol. 23, No.2, Desember 2022 (141 - 157)* DOI: <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i2.33941>
- Jesuit, D. K., & Sych, L. (2012). Local Economic Development and Cross Border Network. *International Journal of Public Sector Management*, 25, 473–482.
- Kennedy, Posma, Suzanna JL Tobing, Rutman L Toruan, Emma Tampubolon (2019). Diskusi Mengenai Isu Strategis Tentang Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Vol. 1 No. 2 (2019): Oktober. DOI: <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1277>
- Kumari, R., & Devadas, V. (2017). Modelling The Dynamic of Economic Development Driven by Agricultural Growth in Patna Region India. *Journal of Economic Structures*, 6–15.
- Kuncoro, H. (2012). Apakah Tata Kelola Perekonomian Daerah di Indonesia Telah Berubah ? *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 85–108.
- Luu, H. N., & Nguyen, N. M. (2019). Infrastructure and Economic Development in Developing Economies – New Empirical Evidence from Night Satellite Imagery in Vietnam. *International of Journal Economics*, 46, 581–594.
- Migdal, J. S. (2004). *Mental Maps and Virtual Checkpoints; Struggles to Construcy AndMaintain State And Social Boundaries*. In Cambridge University Press.
- Mulyana, A. (2013). Pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2, 10551.
- Muta’ali, L. (2014). *Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPF) Universitas Gadjah Mada.
- Newman, D. (2003). On Borders and Power: A Theoretical Framework. *Journal of Borderland Studies*, 18, 13–25.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2012). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. LP3ES.
- Nurzaman, S. S. (2012). *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia*. ITB Press.
- OECD-JRC European Comission. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide*. OECD Publishing.
- Priyarsono, D. . (2017). Membangun dari Pinggiran; Tinjauan Dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional. *Jurnal of Regional and Rural Development Planning*, 1, 42–52.
- Rudolf, R. (2005). The New Institutional Economics. It’s Start, It’s Meaning, It’s Prospect. *The European Bussiness Organization Law Review (EBOR)*, 6(2), 61–200.
- Rustiadi, E. (2015). *Paradigma Baru Proses Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Bahan Ajar Perkuliahan PWD 2015.
- Supartoyo, Y. H., Tatu, J., & Sendow, R. H. E. (2013). *The Economic Growth and the Characteristic : the Case*

- of Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 16, 3–18.
- Utama, N. P. (2014). Investment Promotion Policy in Potential BorderZone. *Procedia Economics and Finance*, 14, 615–623.
- Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock Looking Ahead. *Journal of Economics Literature*, 28(3), 595–613.
- Wu, C.-T. (2021). Cross-border development in a changing world: Redefining regional development policies. *Contributions in Economics and Economic History*, 2, 21–38.